**AKAD TRANSAKSI UMRAH:**

**KAJIAN KOMPARATIF ANTARA BAY DAN *IJARAH***

**Sugeng Widodoa, Salihah Khairawatib**

a, b Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Hamfara, Yogyakarta

*Surel*: Corresponding author: [skbhamfara@gmail.com](mailto:skbhamfara@gmail.com) a

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Info Artikel**  ***AT TAUZI’***  *Volume 23*  *Nomor 1*  *Halaman 53-62.*  *Juni 2023*  *ISSN: 2086-1184*  *e-ISSN: 2715-9043*  *DOI: 10.37820*  ***Kronologi Artikel:***  *Tanggal Masuk:*  3 Januari 2022  *Tanggal Revisi:*  10 Maret 2022  *Tanggal Diterima:*  13 Mei 2022    ***Kata Kunci:***  akad transaksi, umrah, bai’, *ijarah* |  | ***Abstrak: Akad Transaksi Umrah: Kajian Komparatif Antara Bay Dan Ijarah.*** Perkembangan jumlah biro penyelenggara umrah di Indonesia meningkat beberapa tahun terakhir, hal ini merupakan respon terhadap tingginya animo masyarakat muslim untuk menjalankan ibadah umrah di tanah suci. Persoalan yang sering kali muncul dari biro maupun jasa layanan penyelenggara umrah adalah kesalahan dalam menggunakan akad transaksi umrah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji akad transaksi layanan biro perjalanan umrah yang tepat sesuai dengan syarat dan rukun muamalah. Kajian ini merupakan kajian kualitatif bersifat diskriptif, studi literatur digunakan guna menganalisis objek kajian, analisis dilakukan dengan membandingkan satu akad dengan akad lainnya, dan ditarik kesimpulan akad yang paling tepat untuk transaksi layanan umrah. Hasil analisis menyimpulkan bahwa akad *ijarah* merupakan akad yang paling tepat bagi transaksi layanan perjalanan ibadah umrah, hal ini sudah sesuai dengan syarat dan rukun muamalah dalam Islam.  ***Abstract: Umrah Transaction Agreement: A Comparative Study Between Bay and Ijarah.*** *The growth of the number of Umrah organizing bureaus in Indonesia has increased in recent years, this is a response to the high interest of the Muslim community to perform the Umrah in the Holy Land. The problem that often arises from bureaus and Umrah service providers is a mistake in using a transaction agreement (contract). The purpose of this study was to examine the right service contract for the Umrah travel agency in accordance with the conditions and cornerstones of muamalah. This research is a descriptive qualitative study, a literature study is used to analyze the object of study, the analysis is done by comparing one contract with another contract, and conclusions drawn the most appropriate contract for Umrah service transactions. The results of the analysis concluded that the ijarah contract is the most appropriate contract for the Umrah service contract, this is in accordance with the condiiton and cornerstone of muamalah in Islam* |
| Disitasi sebagai: Widodo, S., Khairawati, S., (2023). Akad Transaksi Umrah: Kajian Komparatif Antara Bay Dan *Ijarah*. *AT-TAUZI': Jurnal Ekonomi Islam*, 22(2), 53-63. doi: <https://doi.org/10.37820/attauzi.v22i2.205> | | |
|  | | |

**PENDAHULUAN**

Peningkatan minat masyarakat Indonesia untuk melakukan ibadah umrah ke tanah suci beberapa tahun terakhir ini mengalami lonjakan yang cukup menggembirakan. Menurut Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kementerian Agama (Kemenag) M Arfi Hatim bahwa tahun 2017 jumlah jamaah yang melakukan umrah dari Indonesia sebanyak 870.000 peserta sedangkan pada tahun 2018 diperkirakan mencapai 1.000.000 peserta. Salah satu hal yang memicu peningkatan jumlah peserta umrah adalah daftar antrian keberangkatan haji yang cukup lama (Aini & Wahab, 2016). Keadaan ini mendorong kemunculan perusahaan-perusahaan yang menawarkan paket perjalanan ibadah umrah, baik yang hanya melayani sebatas ibadah umrah maupun penawaran melancong ke berbagai tujuan setelah usainya pelaksanaan ibadah umrah.

Bisnis umrah di Indonesia sangat menarik bagi pebisnis. Konsep layanan yang ditawarkan oleh perusahan-perusahaan tersebut adalah ibadah saja atau ibadah plus wisata reliji, ibadah plus wisata muslim (moslem friendly tourism). Variasi layanan yang banyak, berdampak secara otomatis jangka waktu yang diperlukan untuk perjalanan juga bervariatif (cepat dan lama), dan konsekuensinya harga layanannya bervariatif. Macam penyelenggaraannya bisa yang bersifat rutin berdasarkan kalender bulanan ataupun untuk waktu atau bulan tertentu, misal umrah Romadhon.

Pihak penyelenggara bisa biro perjalanan maupun lembaga keuangan Syariah, baik mikro (KSPPS-Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah), BPRS-Bank Pembiayaan Rakyat Syariah perbankan umum Islam atau Syariah maupun kerja sama antara Lembaga Keuangan Islam atau Lembaga Keuangan Syariah dengan biro perjalanan penyelenggara umrah. Kerjasama dilakukan dengan bermacam-macam model, yakni lembaga sebagai tempat pendaftaran dan pembayaran ibadah umrah, lembaga menjadi lembaga penyandang dana pinjaman bagi jamaah yang dananya terbatas sehingga jamaah dapat berangkat umrah dengan pembayaran diangsur dan lembaga sebagai pengelola dana umrah dengan cara nasabah menyisihkan secara rutin pada lembaga dan pada saat dananya cukup nasabah dapat berangkat umrah. Dalam menjalankan setiap kegiatannya Lembaga Keuangan Syariah atau Bank Syariah harus mengikuti prinsip-prinsip syariah. Dalam prinsip Hukum Muamalat disebutkan bahwa segala bentuk muamalat dibolehkan kecuali yang dilarang oleh syariat. Seperti halnya dengan penggunaan akad. Setiap produk yang dikeluarkan oleh LKS harus menggunakan akad yang tepat (Aini & Wahab, 2016).

Banyaknya moda pembayaran umrah meningkatkan peluang terjadinya penyimpangan-penyimpangan pada administrasi, akad muamalah, penyimpangan hukum yang pada bisa merugikan pihak jamaah. Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian yang pernah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu yang mengkaji aspek legal (hukum) dari suatu travel agen umrah, seperti (Cahyaningrum, 2017) mengungkapkan adanya kasus fraud yang dilakukan oleh pemilik First Travel yakni adanya bentuk-bentuk pelanggaran hukum dari First Travel meliputi pelanggaran hak-hak sipil, kriminal dan adminisrasi. Lestari et al. (2019) juga mempelajari praktik talangan untuk ibadah haji, meskipun ketentuan biaya pendaftaran porsi haji sudah berubah.

Berbagai cara dilakukan oleh berbagai perusahaan jasa penyelengara Biro Haji dan Umrah untuk meningkatkan jumlah pelanggan atau jamaah haji plus dan umrah. Amilia, Rachmawati, & Febriandika (2019) meneliti tentang implementasi strategi bisnis dengan skema model MLM pada Haji dan Umrah bagi travel agen PT Arminareka. Hasil kajian yang dilakukan menegaskan bahwa praktek strategi bisnis dengan skema model MLM dari PT Arminareka menggunakan akad ju’alah berdasarkan fatwa DSN No: 83/DSN-MUI/2012 dan hal ini diperbolehkan. Imaniyati (2019) melakukan kajian hukum normatif dengan analisis deskriptif dengan menggunakan data sekunder. Hasil kajian terhadap peraturan hukum yang dikeluarkan Kementerian Agama No. 8 Tahun 2018 tidak mengatur secara rinci jenis akad jamaah umrah dengan penyelenggara (biro travel). Berdasarkan hukum ekonomi Islam, akad yang dianggap tepat adalah akad *Ijarah al ‘amal musytarak*. Berdasarkan prinsip-prinsip syariah akad tidak boleh ada unsur riba, spekulasi, perjudian, haram, dan zalim.

Kajian yang membahas mengenai akad transaksi pelayanan biro umrah hingga kini masih sedikit ditemukan. Kajian dalam artikel ini dimaksudkan untuk melengkapi keterbatasan literatur mengenai akad transaksi pelayanan biro umrah dengan pendekatan kajian komparatif antara akad *al-ba’i* dan akad *ijarah*. Kajian komparatif dilakukan untuk memberi pandangan bagi pembaca mengenai akad yang lebih tepat digunakan bagi akad transaksi pelayanan biro umrah. Maksud dari kajian ini adalah untuk mempelajari bagaimana model akad umrah yang dianggap sesuai dari beberapa akad dalam muamalah yang ada. Artikel ini dibagi menjadi empat bagian, pertama adalah abstrak dan pendahuluan, bagian kedua menjabarkan kajian literatur, bagian ketiga menjabarkan metode penelitian, adapun pada bagian keempat berisi pembahasan, sedangkan bagian terakhir adalah kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran penelitian lanjutan.

**TINJAUAN PUSTAKA**

**Ibadah Umrah.** Umrah, dalam bahasa Arab, artinya ziarah. Menurut pendapat lainnya pergi ke suatu tempat yang berpenghuni. Ibadah ini disebut umrah karena boleh dilaksanakan sepanjang umur. Adapun pengertian, umrah dalam istilah syariat adalah: pergi ke Ka'bah untuk menunaikan ibadah, yaitu thawaf dan sa’i (Al Zuhayli, 2002). Menurut Mughniyah (2015) jenis Umrah ada dua (2), yaitu: *Umrah Mufradah* (berpisah dengan haji) dan *Umrah Tamatu* (Bersama haji). Hukum Umrah menurut madzhab Hanafi dan pendapat yang paling rajih dalam madzhab Maliki, umrah itu sunnah muakad satu kali seumur hidup. Adapun pengulangan umrah menurut madzhab Syafi’i, Hambali, dan Hanafi, seseorang boleh berumrah berkali-kali dalam setahun (Al Zuhayli, 2002).

**Jual-beli (al Bai’).** Menurut etimologi, jual-beli diartikan pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain. Rukun jual beli meliputi: bai’ (penjual), musytari (pembeli), shighat (ijab qabul), ma’qud ‘alaih (benda atau barang). Rahmat (2001) menyampaikan bahwa terdapat perbedaan pendapat para ulama tentang definisi jual beli, antara lain: (a) Ulama Hanafiyah: Pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan); (b) Imam Nawawi: Pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan; dan (c) Ibnu Qadamah: Pertukaran harta dengan harta untuk saling menjadikan hak milik.

**Murabahah.** Murabahah adalah istilah fiqih Islam dan mengacu pada jenis penjualan tertentu yang tidak ada hubungannya dengan pembiayaan dalam arti aslinya. Jika seorang penjual setuju dengan pembeli untuk memberinya komoditas tertentu pada keuntungan tertentu yang ditambahkan ke biayanya, itu disebut transaksi murabahah. Konsep dasar murabahah adalah bahwa penjual mengungkapkan biaya aktual yang telah dikeluarkan untuk memperoleh komoditas, dan kemudian menambahkan beberapa keuntungan di atasnya. Keuntungan ini bisa dalam nominal atau lump sum atau persentase (Usmani, 1998).

Zuhayli (2002) berpendapat bahwa *cost plus sale* (*bay'u al-murabaha*): dalam penjualan ini adalah objek dijual pada harga diperoleh ditambah marjin keuntungan tertentu. Madzab Maliki mendefinisikan transaksi ini demikian: penjual menginformasikan ke pembeli biaya perolehan objek jual-beli, dan menambahkan marjin keuntungan baik secara nominal atau lump sum. Contohnya dengan akad “saya membeli (barang) ini seharga 10, dan bayarlah saya 2 sebagai keuntungan”, atau dapat dinyatakan marjin keuntungan secara persentase atau rasio, misalnya dengan akad “bayarlah saya 20% untuk keuntungan”. Madzab Hanafi mendefinisikan sebagai transfer dari objek yang diperoleh dari transaksi sebelumnya untuk pertukaran sebesar harga asli/asal ditambah marjin keuntungan. Madzhab Syafi’i dan Hambali menyatakan bahwa menjual (barang) sebesar harga pokok ditambah marjin keuntungan, asalkan kedua belah pihak mengetahui harga asalnya (biaya untuk mendapatkan objek penjualan).

Murabahah atau "cost plus sale", yang mana para pihak melakukan tawar-menawar pada marjin keuntungan atas harga (barang) yang (telah) diketahui (oleh mereka). Penjual harus mengungkapkan (secara jujur) biaya yang dia bayar untuk mendapatkan barang tersebut dan juga menyampaikan semua biayanya kepada pembeli (Ayub, 1999).

***Ijarah*.** Usmani (1998) menyatakan *ijarah* dalam fikih Islam secara leksikal berarti 'memberikan sesuatu untuk disewa'. Dalam yurisprudensi Islam, istilah '*Ijarah*' digunakan untuk dua situasi yang berbeda. Pertama, ini berarti mempekerjakan jasa seseorang dengan imbalan upah yang diberikan kepadanya sebagai imbalan jasanya. Majikan disebut musta'jir sementara karyawan disebut ajir. Kedua, *Ijarah* berkaitan dengan manfaat (*usufructs*) barang dan properti, dan bukan pada jasa manusia. '*Ijarah*' dalam pengertian ini berarti 'untuk memindahkan manfaat (*usufruct*) harta tertentu kepada orang lain dengan imbalan sewa yang ditagihkan darinya (orang lain tersebut). Terkait hal ini, istilah '*Ijarah*' sama dengan istilah 'leasing' dalam bahasa Inggris. Di sini, pihak yang menyewakan (lessor) disebut 'mu'ji ', penyewa (*lessee*) disebut '*musta'jir*' dan uang sewa yang harus dibayarkan kepada *lessor* disebut '*ujrah*'.

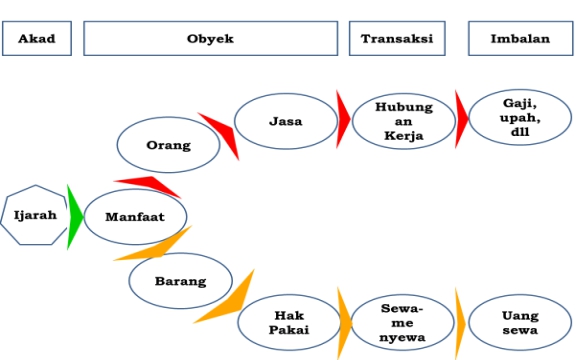
Zuhayli (2002) menyatakan para fuqaha sepakat bahwa sewa diperbolehkan, dengan pengecualian Abu Bakar Al Asamm, Ismail bin Ulayyah, Al-Hasan Al-Basri, Al-Qashani, Al-Nahrawani, dan Ibnu Kayyisan, yang tidak mengizinkannya. Logika kelompok yang terakhir ini: sewa adalah penjualan manfaat (*usufruct*). Karena manfaat (*usufruct*) tidak diterima pada saat transaksi, tetapi diterima dalam suatu periode, karenanya transaksi sewa-menyewa merupakan jual-beli suatu barang yang tidak ada, yang mana hal ini tidak diperbolehkan. Selain itu, mereka tidak bisa mengesahkan penjualan sesuatu yang prosesnya berurutan, karena barang tidak mungkin sebagai objek penjualan dari waktu ke waktu. Ibnu Rushd menentang pendapat ini dengan menyatakan bahwa walaupun manfaat (*usufruct*) tidak ada pada saat transaksi, (namun) keberadaan manfaat tersebut di waktu mendatang sangat mungkin terjadi/ada. Dalam hal ini, legalitas dari sewa berasal dari hak pakai manfaat (*usufruct*) yang hampir pasti ada, atau manfaat yang ada atau tidaknya seimbang.

Rahmat (2001) berpendapat menurut etimologi *ijarah* adalah menjual manfaat. Ada yang menterjemahkan, *ijarah* sebagai jual-beli jasa (upah-mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia, ada pula yang menterjemahkan sewa-menyewa. *Ijarah* didefinisikan juga dengan mengambil manfaat dari suatu barang. Rukun *ijarah* menurut jumhur ulama, terdiri dari empat, yaitu: (1) ‘Aqid (orang yang berakad), (2) Shighat akad, (3) Ujrah (upah), dan (4) Manfaat.

Adapun menurut (Ayub, 1999) secara harfiah, *Ijarah* berasal dari *al-'Ajr* dan berarti kompensasi, pengganti, pertimbangan, pengembalian atau nilai kontra/tebusan (*al-'Iwad*). Sebagai kontrak (akad), ini mengacu pada pengupahan atau penyewaan aset atau komoditas untuk mendapatkan pemanfaatan atasnya. Ini juga mencakup penyewaan tenaga kerja dan kontrak kerja bagi siapa pun untuk mendapatkan imbalan (upah). Oleh karena itu, secara umum peraturan dan prinsip tenaga kerja, penyewaan, *ju'alah* dan semua kontrak kemanfaatan barang dan jasa tercakup dalam istilah *ijarah*. Istilah lain yang jarang digunakan untuk kontrak atau akad demkian adalah *kira'a* dan *istijar*. Dalam hukum Islam, *ijarah* adalah kontrak yang dikenal dan diusulkan untuk barang tertentu untuk jangka waktu tertentu terhadap yang ditentukan dan sah atau ganjaran bagi jasa atau keuntungan untuk manfaat yang diajukan yang akan dikeuarkan. Dengan kata lain, itu adalah transfer hak pemanfaatan untuk ganjaran yang berupa sewa dalam hal penyewaan aset atau barang dan upah dalam hal mempekerjakan orang.

*Ijarah* bermaksud memberikan sesuatu untuk disewakan. Ini adalah kontrak sewa dan penyewaan, di mana dua pihak yang terlibat, bank sebagai *ajir* (*lessor*) dan klien sebagai *mustajir* (*lessee*). Fitur yang penting dari sewa *ijarah* adalah kepemilikan aset tetap dengan Bank (*lessor*) selama masa sewa. Klien (*lessee*) harus membayar sewa untuk kepemilikan aset. Tiga pihak juga dapat terlibat dalam kontrak *ijarah* ketika aset pembelian bank dari *supplier* (*vendor*) dan kemudian disewakan kepada klien (Jamal, 2018).

Menurut para ahli fiqih, *Ijarah* adalah penjualan dari manfaat (dan bukan dari 'ain atau barang fisik) dari komoditas apapun dalam pertukaran ujrah, upah atau sewa, dan meliputi rumah, toko, mengendarai atau mempekerjakan hewan, perhiasan, pakaian dan lain sebagainya. Gambar 1 menunjukkan skema *ijarah* untuk memperjelas dan mempermudah pemahaman tentang *Ijarah*.



Gambar 1. Skema *Ijarah*

**METODE**

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan menggunakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penelitian studi kepustakaan, yaitu dengan cara mempelajari, mendalami, dan mengutip teori-teori atau konsep-konsep dari sejumlah literatur (Sugiyono 2018). Sedangkan analisis data yang digunakan yaitu analisis konten (content analysis) agar diperoleh suatu pemahaman dan pemaknaan yang akurat. Analisis data dilakukan dengan mengkaji literatur-literatur yang ada dengan membandingkan satu konsep pemikiran akad dengan konsep yang lain. Pada akhir proses analisis data, penulis menyimpulkan satu yang konsep akad yang dianggap tepat bagi akad layanan umrah.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. **Perbandingan Akad Transaksi Layanan Umrah: al ba’i, murabahah dan *ijarah***

Akad muamalah dalam Islam cukup banyak, akan tetapi penulis mencoba untuk mengkaji tiga jenis akad yang mungkin dapat digunakan bagi transaksi layanan (jasa) penyelenggaraan umrah dari biro umrah kepada jamaah umrah (klien). Tabel 1 menunjukkan ringkasan perbedaan antara akad al ba’i, murabahah dan *ijarah* ditinjau dari segi objek, jenis transaski dan imbalannya.

Tabel 1. Perbandingan antara akad al ba’i, murabah, *ijarah*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Jenis Akad** | **Objek Akad** | **Transaksi** | **Imbalan** |
| 1 | al-Bai' | Barang | Jual beli | Margin (keuntungan) |
| 2 | Murabahah | Barang | Jual beli | Margin (keuntungan) |
| 3 | *Ijarah* | Manfaat | Sewa menyewa | Upah sewa/Upah Jasa |
| Sumber: Taqi Usmai, Wahbah Zuhayli, Muhammad Ayub | | | |  |

Akad transaksi layanan umrah dibandingkan antara akad al ba’i, akad murabahah dan akad *ijarah*.

1. **Akad al Bai’ Untuk Transaksi Layanan Umrah**

Kegiatan umrah, merupakan kegiatan yang melibatkan interaksi antara jamaah umrah dengan penyedia layanan umrah (biro umrah). Akad transaksi layanan umrah baik dari biro perjalanan umrah maupun dari lembaga keuangan syariah jika menggunakan akad al ba’i (jual beli) bila direnungkan lebih dalam dianggap kurang tepat. Ada dua pertimbangan yang memperkuat pernyataan akad al bai’ kurang tepat, yaitu: (1) objek akad dan (2) pelaku akad.

1) Objek Akad

Transaksi al bai’ (jual-beli) pada dasarnya adalah transaksi pertukaran harta dengan barang antara pembeli dan penjual. Dengan pengertian lain bahwa “objek jual-beli” adalah “barang nyata atau komoditas”. Merujuk pada pada rukun jual-beli (*al-bai’*) bahwa objek dalam jual beli (*al-bai’*) adalah barang atau komoditas. Rukun *al-bai’* itu sendiri menjelaskan pihak penjual harus memiliki komoditas atau barang yang dijadikan objek jual beli. Sabiq (1992) memberi pengertian bahwa jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Adapun jasa layanan umrah bukan merupakan komoditas atau barang, Penggunaan akad *al-bai’* (jual beli) dalam transaksi layanan umrah tampak tidak sesuai dengan objek akad dalam jual beli. Sesuatu yang tidak berupa barang atau harta atau yang dihukumi tidak sah untuk diperjualbelikan (Zuhayli, 2002).

2) Pelaku Akad

Penjual adalah pemilik atau wakil pemilik komoditas yang menjadi objek transaksi. Bahwa dalam jual-beli dipersyaratkan juga harus tersedianya komoditas saat transaksi jual-beli dilaksanakan. Perjalanan umrah pada umumnya, objeknya tersebar dan proses penciptaan objek berjalan atau berlangsung sepanjang perjalanan dan baru akan dilakukan di waktu mendatang, dan tidak mungkin tersedia secara fisik pada saat transaksi dilakukan. Manfaat baru bisa dirasakan pada saat proses kegiatan umrah berlangsung (Lubis, 2020). Objek perjalanan umrah meliputi: penerbangan pergi-pulang, pelayanan akomodasi di tanah air dan di tanah suci, pelayanan konsumsi, pelayanan transportasi, pelayanan di tanah suci, perlindungan, pelayanan di keberangkatan dan kedatangan, pelayanan keimigrasian, premi asuransi dan pelindungan lainnya, dokumen perjalanan, pembinaan dan bimbingan jemaah di tanah air dan di tanah suci, dan kesehatan jika diperlukan. Jika dianalogkan dengan penjual, maka dalam layanan ibadah umrah baik Lembaga Keuangan Syariah ataupun biro perjalanan umrah bukanlah pemilik atau wakil pemilik seperti layanan transportasi, penginapan, dan lain sebagainya.

Pembeli dalam transaksi jual beli bisa pembeli dalam pengertian pihak pengguna barang secara langsung ataupun wakil dari pembeli yang sebenarnya (*end user*) yang pada dasarnya begitu transaksi jual-beli (barang) usai, pembeli langsung menerima objek jual-beli. Sementara dalam transaksi layanan ibadah umrah, khusunya end user tidak akan menerima objek transaksi pada saat itu juga, tetapi objek tersebut akan diterima di waktu yang akan datang secara berantai.

1. **Akad Murabahah Untuk Transaksi Layanan Umrah**

Adanya beberapa Lembaga Keuangan Syariah yang menawarkan pembiayaan pelaksanaan ibadah umrah dengan akad Murabahah, di mana Lembaga Keuangan Syariah atau biro umrah menawarkan fasilitas pelayanan ibadah umrah dengan pembiayaan berupa dana pinjaman. Akad murabahah bagi suatu penawaran harga layanan, tidak sesuai dengan syariah. Akad transaksi Murabahah menurut para ulama fiqih, pada dasarnya adalah jual-beli (atas dasar kepercayaan, yang mana secara syara’ penjual wajib menyampaikan secara jujur harga pokok atau biaya barang yang menjadi objek jual-beli). Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati antara penjual dan pembeli, penjual secara jelas memberi tahu kepada pembeli berapa harga pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang diinginkannya (Antonio, 2011). Bai‟ al-murâbahah termasuk jual-beli yang dibolehkan, yaitu jual-beli barang dengan harga yang pasti (harga pokok plus margin keuntungan) yang harus dibayar oleh pembeli (Nurhayati, 2017).

Sebagaimana lazimnya jual-beli, murabahah sebagai salah satu jenis jual-beli mensyaratkan tersedianya barang sebgai objek jual-beli pada saat jual-beli dilaksanakan. Sedangkan ibadah umrah, yang ditawarkan Lembaga Keuangan Syariah adalah serangkaian layanan kepada para calon jamaah umrah. Dalam rangkaian layanan perjalanan ibadah umrah penyelenggara juga memberikan barang seperti alat perlengkapan ibadah umrah, tetapi ini adalah dari bagian layanan secara keseluruhan, dan (barang demikian bukan merupakan objek transaksi pokok. Dengan demikian, akad murabahah bagi layanan umrah yang ditawarkan Lembaga Keuangan Syariah kepada calon jamaah (nasabah) bukanlah akad yang tepat.

1. **Akad *Ijarah* Untuk Transaksi Layanan Umrah**

Usmani (1998) dan A. Zuhayli (2002) menegaskan pada intinya *ijarah* adalah *transfer of usufruct* atau pengalihan manfaat. Manfaat itu dapat berupa manfaat barang atau dapat berupa hak pakai dan juga manfaat orang kalau dapat disebut jasa, antara lain: (1) penggunaan transportasi dalam umrah, pembelian tiket pada dasarnya adalah membeli hak pakai atas bis, kereta api, kapal laut, dan pesawat udara sebagai alat transportasi untuk berpindah tempat dari yang satu ke yang lain, dari kota satu ke kota lain; (2) sarana ibadah umrah lainnya adalah hotel, berupa hak pakai tempat penginapan dengan layanan lengkap (makan, minum, istirahat, dan sebagainya); dan (3) pengurusan visa ataupun paspor serta penyediaan perlengkapan umrah, manasik umrah. Terkait masalah ini, transaksinya yang tepat adalah pembelian jasa dengan kompensasi upah atau honor atau sejenisnya.

Usmani (1998) menegaskan *Ijarah* adalah istilah fikih Islam secara leksikal itu berarti untuk memberikan sesuatu untuk disewa. Dalam yurisprudensi Islam, istilah *Ijarah* digunakan untuk dua situasi yang berbeda. Pada kondisi pertama, *ijarah* berarti untuk mempekerjakan layanan dari seseorang dengan upah yang diberikan kepadanya sebagai pertimbangan untuk layanan pengupahnya. Majikan disebut *musta'jir* sementara karyawan disebut *ajir*. Pada kondisi kedua, *ijarah* berkaitan dengan manfaat barang dan properti, dan bukan pada jasa manusia.

*Ijarah* dalam pengertian ini berarti untuk memindahkan manfaat dari harta tertentu kepada orang lain dengan imbalan sewa yang ditagihkan kepadanya. Dalam hal ini, istilah *ijarah* bersifat analog dengan istilah *leasing* dalam bahasa Inggris. Di sini, *lessor* disebut *mu'jir*, penyewa disebut *musta'jir* dan uang sewa yang harus dibayarkan kepada *lessor* disebut *'ujrah'*.

Zuhayli (2002) menyatakan para fuqaha sepakat bahwa sewa diperbolehkan, dengan pengecualian Abu Bakar al-Asamm, Ismail bin Ulayyah, al-Hasan al-Basri, al-Qashani, al-Nahrawani, dan Ibnu Kayyisan, yang tidak mengizinkannya. Logika kelompok yang terakhir ini: sewa adalah penjualan manfaat (*usufruct*). Karena manfaat (*usufruct*) tidak diterima pada saat transaksi, tetapi diterima dalam suatu periode, karenanya transaksi sewa-menyewa merupakan jual-beli suatu barang yang tidak ada, yang mana hal ini tidak diperbolehkan. Selain itu, mereka tidak bisa mengesahkan penjualan sesuatu yang prosesnya berurutan, karena barang tidak mungkin sebagai objek penjualan dari waktu ke waktu. Ibnu Rushd menentang pendapat ini dengan menyatakan bahwa walaupun manfaat (*usufruct*) tidak ada pada saat transaksi, (namun) keberadaan manfaat tersebut di waktu mendatang sangat mungkin terjadi/ada. Dalam hal ini, legalitas dari sewa berasal dari hak pakai manfaat (*usufruct*) yang hampir pasti ada, atau manfaat yang ada atau tidaknya seimbang.

Adapun menurut Ayub (2007) secara harfiah, *Ijarah* berasal dari *al-'Ajr* dan berarti kompensasi, pengganti, pertimbangan, pengembalian atau nilai kontra/ tebusan (*al-'iwad*). Sebagai kontrak (akad), ini mengacu pada pengupahan atau penyewaan aset/komoditas untuk mendapatkan pemanfaatan atasnya. Ini juga mencakup penyewaan tenaga kerja dan kontrak kerja bagi siapa pun untuk mendapatkan imbalan (upah). Oleh karena itu, secara umum peraturan dan prinsip tenaga kerja, penyewaan, *ju'alah* dan semua kontrak kemanfaatan barang dan jasa tercakup dalam istilah *Ijarah*. Istilah lain yang jarang digunakan untuk kontrak/akad demkian adalah *kira'a* dan *istijar*. Dengan kata lain, itu adalah transfer hak pemanfaatan untuk ganjaran yang berupa sewa dalam hal penyewaan aset atau barang dan upah dalam hal mempekerjakan orang.

Menurut Lubis (2020) dalam penelitiannya akad *ijarah* ini tepat digunakan untuk produk pembiayaan umrah sebab objek dari pembiayaan (perjalanan umrah) termasuk *intangible asset* (aset tidak berwujud namun manfaatnya bisa digunakan atau dirasakan). Sesuai dengan esensi dari Akad *Ijarah* itu sendiri, yaitu *ba'i al-manaafi'* (Jual Beli Manfaat). Kemudian manfaat barang yang akan dirasakan pun tidak ada pada saat akad *ijarah* berlangsung. Penelian ini juga sejalan dengan kajian yang dilakukan oleh Oktaviani (2018) bahwa dalam akad *ijarah* manfaat dari barang atau jasa baru dapat dirasakan pada saat hari keberangkatan perjalanan haji/umrah hingga selesainya kegiatan. Inilah yang disebut dengan istilah *maushufah fi al-dzimmah*.

Menurut Novindri (2013) sebagaimana kasus yang terjadi pada pembiayaan pengurusan haji, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat memeproleh imbalan (ujrah) dengan menggunakan prinsip *Ijarah* sesuai fatwa DSN-MUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2000. Berkaca pada hal tersebut, maka prinsip *ijarah* pun dapat digunakan untuk pengurusan pembiayaan umrah Lembaga Keuangan Syariah (LKS) atau pengurusa pejalanan umrah dari penyedia jasa.

**SIMPULAN**

Berdasarkan paparan, pembahasan di atas diantara ketiga akad maka transaksi layanan umrah lebih tepat bila menggunakan akad *ijarah*, baik dalam pengertian upah-mengupah maupun sewa-menyewa dibandingkan dengan akad *al-bai’*. Hal ini disebabkan objek layanan umrah adalah manfaat yang tersebar sejak dimulainya keberangkatan umrah, pelaksanaan ibadah umrah hingga selesai kemudian sampai kembalinya ke kota atau tempat keberangkatan semula. Akad *ijarah* ini dapat digunakan oleh biro perjalanan penyelenggara ibadah umrah, Lembaga Keuangan Syariah dan kerjasama antara keduanya yakni akad *ijarah bil ijarah*. Artinya, Lembaga Keuangan Syariah yang tidak memiliki unit kerja yang menangani perjalanan Umrah melakukan transaksi *ijarah* dari Biro Perjalanan penyelenggara perjalanan Umrah untuk kemudian di-*ijarah*kan ulang kepada nasabahnya yang berniat melakukan ibadah Umrah.

**DISKUSI**

Pembahasan dalam penelitian ini memberikan gambaran bagi pelaku biro peyelenggara umrah jenis akad yang sesuai untuk bagi transaski bisnisnya. Dengan demikian kerancuan pemilihan akad dalam transaksi layanan penyelenggaraan umrah dapat dihindari. Penelitan ini merupakan penelitian dasar yang pada tahap selanjutnya masih perlu dikembangkan lagi dalam tataran kajian emperik. Diharapkan penelitian lanjutan dapat mengkaji lebih mendalam sehingga dapat menjadi acuan dalam mengembangkan akad bagi lembaga bisnis yang akan menawarkan layanan umrah.

# DAFTAR RUJUKAN

Aini, F., & Wahab, A. (2016). PENERAPAN ALTERNATIF AKAD PEMBIAYAAN HAJI DAN UMRAH PASCA PERATURAN MENTERI NO 24 TAHUN 2016 PADA BANK PANIN DUBAI SYARIAH SURABAYA, (24). https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30651/justeko.v2i1.1692

Al Zuhayli, W. (2002). *iti sh Fo od Jo ur*. *Al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhu, Syria:* Syiria: Damascus: Dar al Fikr.

Amilia, S., Rachmawati, B., & Febriandika, N. R. (2019). Implementation of Sharia Business Strategy Development Through Sharia Multilevel Marketing Schemes in Hajj and Umrah Travel Agencies. In *Advances in Economics, Business and Management Research, volume 101 1st* (Vol. 101, pp. 303–306). Atlantis Press.

Antonio, M. S. (2011). ISLAMIC MICROFINANCE INITIATIVES TO ENHANCE SMALL From Historical Overview to Contemporary Situation Muhammad Syafii Antonio Tazkia University College of Islamic Economics , Jakarta. *Journal of Indonesian Islam*, *05*(02), 313–334.

Ayub, M. (1999). *Understanding Islamic Finance*. (M. F. K. Chief, Ed.). London: IIBI.

Cahyaningrum, D. (2017). TANGGUNG JAWAB HUKUM FIRST TRAVEL. *Majalah Info Singkat Hukum*, *9*(16). Retrieved from www.puslit.dpr.go.id

Imaniyati, N. S. (2019). THE AGREEMENT OF UMRAH PILGRIMAGE WITH UMRAH TRAVEL OPERATORS ( According to PMA Number 8 Year 2018 and Sharia Economic Law ). In *UniSHAMS-INTERNATIONAL CONFERENCE 2019/ e-PROCEEDINGS THE* (pp. 66–80).

Jamal, K. F. (2018). Relationship Analysis of Islamic Banking between Malaysia and Pakistan. *Journal of Management Info (JMI)*, *5*(4), 1–6. https://doi.org/10.31580/jmi.v5i4.114

Lestari, W. D., Surakarta, U. M., Nurhayati, S. F., Surakarta, U. M., Irawati, Z., Surakarta, U. M., … Surakarta, U. M. (2019). Hajj Financing With Sharia Pawnshop. In *Advances in Economics, Business and Management Research, volume 101 1st* (Vol. 101, pp. 246–248). Atlantis Press.

Lubis, M. (2020). INOVASI SISTEMIK PEMBIAYAAN PERJALANAN UMRAH MELALUI AMITRA SYARIAH FINANCING (STUDI KASUS PT. WAKAFA ZAIN ABUL HUSNA). *Jurnal Islamic Circle*, *1*(1), 82–102.

Novindri, S. (2013). Analisis Fikih terhadap Akad Dana Talangan Haji pada Bank Syariah. *Muqtasid*, *4*(1), 27–53.

Nurhayati. (2017). Aqad Al - Ba’i Murabahah menurut AlQur’an, Fatwa MUI dan Hadist pada Praktik Akad Bai Al-Murabahah di Perbankan Syariah. *Kajian Akntansi, Unisba*, *18*(1), 16–35. https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.29313/ka.v17i2.2511

Oktaviani, F. (2018). Relevansi Akad *Ijarah* Pada Pembiayaan Umrah di Bank Syariah Kantor Pusat Jakarta Perspektif Hukum Islam Pendahuluan. *Iqtishodia : Jurnal Ekonomi Syariah*, *3*(2), 110–131.

Sabiq, A. S. (1992). *Fiqh us Sunnah Hajj and Umrah*. Indianapolis, USA: American Trust Publication.

Usmani, M. M. T. (1998). *an Introduction to Islamic Finance*. Pakistan.